

**JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI;
Analisa Teori Hegemoni Antonio Gramsci terhadap Fenomena Dakwah
Radikal di Media Online**

Fatmawati

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: *fatmawati@uinjkt.ac.id*

Kalsum Minangsih

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: *kalsumminangsih@yahoo.com*

Siti Mahmudah Noorhayati

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: *noorhayatimahmudah@gmail.com*

Abstract

This article will explore new trends of Islamic radicalism dakwah trough Jihad against penista agama (Ahok) as part of jihad NKRI. Trend of radical dakwah in online viral media is interesting researched, regardless of the importance of the election, or Khilafah and NKRI bersyariah on the other side. The purpose of this research is to know the trend of radical dakwah in online viral media by calling jihad against penista agama as part of jihad NKRI and how the implication of this dakwah. Questions from this study will be studied using the theory of domination of interests (hegemony), given the war of position of the radicals is to seize the hegemony of society through viral online media. In the conclusion, the use of the term Jihad against penista agama, as well as political branding that radical groups maintain the integrity of the NKRI is a hegemonic form to defeat the moderate, tolerant, and plural cultural power of Muslims. Those with the intellectual actors behind them, realizing that in order to gain legitimacy the religious power must collaborate with the MUI (fatwa institution), then play social media to invite all to participate and counter discourse. After that, share with interested politicians to advocate on the idea he was proposing. Finally, they use symbolic slogans of Islam to bring Muslims to the struggle that they do.

Keyword: *Penista Agama, Jihad, Hegemony, Radicalism*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji trend dakwah kaum radikal yang menyeru untuk berjihad dan melakukan perlawanan kepada penista agama (Ahok) sebagai bagian dari jihad NKRI. Trend dakwah kaum radikal dalam viral media online ini menarik diteliti, terlepas dari kepentingan pilkada, atau Khilafah dan NKRI bersyariah di sisi lain. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui trend dakwah kaum radikal dalam viral media online dengan menyeru jihad terhadap penista agama sebagai bagian dari jihad NKRI dan bagaimana implikasi dari dakwahnya. Pertanyaan dari penelitian ini akan dikaji menggunakan teori dominasi kepentingan (hegemoni), mengingat *war of position*

kaum radikal adalah merebut hegemoni masyarakat melalui viral media online. Kesimpulannya, penggunaan istilah Jihad melawan penista agama, serta *branding* politis bahwa kelompok radikal tetap menjaga keutuhan NKRI merupakan sebuah wujud hegemonic mereka mengalahkan kekuatan kebudayaan umat Islam yang moderat, toleran, serta plural. Mereka bersama para aktor intelektual di belakangnya, menyadari untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan agama harus berkolaborasi dengan MUI (lembaga fatwa khususnya), kemudian memainkan media sosial untuk mengajak semua berpartisipasi, melakukan *counter discourse*. Setelah itu, berkongsi dengan politisi yang berkepentingan untuk melakukan advokasi terhadap ide yang digagasnya. Terakhir, mereka menggunakan slogan-slogan simbolik bernuansa Islam untuk mendekatkan umat Islam dengan perjuangan yang mereka lakukan.

Kata kunci: *Penista Agama, Jihad, Hegemoni, Radikalisme*

مستخلص

هذه الدراسة ستدرس عن اتجاه الدعوة الراديكالية الذي يدعو إلى الجهاد والمقاومة لشاتم الدين (أهوك/ Ahok) وجعله جزءاً من جهاد NKRI. ومن الجدير بالذكر أن دعاة الراديكالية الفيروسية في وسائل الإعلام عبر الإنترنت مثير للإهتمام للدراسة عنه، بعيداً من مصالح الإنتخابات، أو مصالح الخلافة ونظام NKRI الشرعي من ناحية أخرى. والهدف من هذه الدراسة هو تحديد اتجاه الدعوة الراديكالية الفيروسية في وسائل الإعلام عبر الإنترنت من خلال الدعوة إلى الجهاد والمقاومة لشاتم الدين كجزء من الجهاد لـ NKRI وكيف آتاره في الدعوة. وسيتم دراسة هذا السؤال باستخدام نظرية السيطرة على المصالح (الهيمنة)، نظراً لموقف حرب الراديكاليين هو الإستيلاء على هيمنة المجتمع من خلال الفيروسية في وسائل الإعلام عبر الإنترنت. في الختام، فإن استخدام مصطلح الجهاد والمقاومة لشاتم الدين و كذلك العلامات التجارية السياسية أن الراديكاليين يحافظون على كمال NKRI وهو شكل من الهيمنة على الثقافة الإسلامية المعتدلة المتسامحة التعددية. إنهم مع الفاعلين المفكرين وراءها، يدركون أنه من أجل الحصول على الشرعية، يجب على أن يتعاونوا مع مجلس الفتوى، ثم يستخدمون وسائل الإعلام الإجتماعية ليدعون إلى الجميع للمشاركة و القيام بالخطاب المضاد. وبعد ذلك، المشاركة مع السياسيين المهتمين بالدعوة إلى الفكرة التي كان يقترحها. وأخيراً، يستخدمون الشعارات الرمزية الإسلامية لجعل المسلمين أقرب إلى الجهاد الذي سيؤدونه.

الكلمات الرئيسية: شتائم الدين, جهاد, سيطرة, راديكالية

PENDAHULUAN

Hari Selasa bertepatan dengan Tanggal 27 September 2016 adalah awal dari sebuah kisah dimulai. Pidato dalam kunjungan Gubernur DKI, Basuki Cahaya Purnama atau kerap dipanggil Ahok di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu dianggap telah menghina agama. Dalam pidato kunjungannya terhadap program budidaya kerapu yang didanai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ahok telah menyinggung Surat al-Maidah ayat 51 sebagai salah satu ayat yang dipakai untuk “membohongi” masyarakat. Selang sembilan hari pasca pidato ini disampaikan, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2016, sebuah video rekaman pidato Ahok diunggah melalui akun Facebook Buni Yani berjudul “Penistaan terhadap Agama?” dengan transkripsi pidato Ahok.

Pidato Ahok di Pulau Seribu menyisakan banyak persoalan di kemudian hari. Laporan dan pengaduan kepada polisi datang silih berganti, baik FPI maupun MUI, turut serta menjadi bagian dari sang pelapor. Berbagai media-pun merespon viralnya pidato Ahok sebagai sebuah berita hangat dari Ibu Kota Jakarta. Bahkan pemberitaan ini menjadi berita skala Nasional yang selalu dinikmati oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kendati Ahok telah menyatakan permintaan maafnya kepada publik.

Viralnya media online tentang penistaan agama ini berujung kepada mobilisasi massa umat Islam, baik gerakan umat Islam 411, gerakan umat Islam 212, hingga gerakan umat Islam 505 yang *nota bene* adalah kaum radikal dan intoleran. Mobilisasi dan seruan dakwah kaum radikal melalui moment dan event gerakan umat Islam ini tidak terlepas dari peran media online, baik news media atau media sosial seperti twitter, facebook, youtube, blog maupun aplikasi whatsapp yang di blow up secara besar-besaran sebagai sebuah propaganda radikal untuk menarik simpati umat Islam. Dalam hal ini, Tri Pujiati menilai bahwa propaganda media sosial dijadikan sarana dakwah radikal yang sangat menguntungkan. Secara terang-terangan propaganda dilakukan untuk merekrut massa sebanyak-banyaknya secara tatap muka (*face to face*). Alhasil, sebagai besar korban adalah mereka pada usia remaja yang notabene sebagai pengguna aktif media sosial. Rentang usia 15 – 25 tahun merupakan titik rawan nalar pikir yang mudah dipengaruhi serta diombang-ambing untuk menunjukkan eksistensi diri.¹

¹Tri Pujiati, “Dakwah Radikal dan Propaganda Media Sosial,” dalam <http://jalandamai.org/dakwah-radikal-dan-propaganda-media-sosial.html>

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

Bahkan Nafi Muthohirin menilai bahwa pada dekade kedua abad ke-21 ini muncul kecenderungan kelompok radikal meningkatkan interaksi dan propagandanya. Mereka membuat laman-laman tertentu untuk menyebarkan ide dan gagasan kebencian, pemahaman radikal, ancaman, serta cara membuat bom secara otodidak. Sejumlah *website* tersebut disembunyikan identitasnya dengan alat teknologi enkripsi yang belum diketahui. Bahkan Seiring dengan kontrol yang begitu ketat, kelompok radikal tetap tidak kehilangan akal dan terus bercuit menggunakan akun-akun anonim. Penggunaan meme-meme bergambar yang berisikan pesan radikal juga diciptakan dalam rangka menarik simpati anak-anak muda. Lalu, secara konsisten dan kreatif, gambar-gambar meme itu disebar ke Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp yang menjangkau ribuan netizen dalam waktu singkat.²

Dakwah kaum radikal di media online ketika menyikapi pidato Ahok di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu memberikan gambaran nyata bagaimana gerakan perlawanan kaum radikal terhadap situasi yang ada. Bahka slogan dan jargon yang selalu menjadi hastag media online garapan kaum radikal adalah seruan dakwah untuk melakukan jihad terhadap penista agama sebagai bagian dari jihad NKRI. Slogan yang selalu dikumandangkan adalah: “Siap berjihad? Siap bela negara, siap bela Islam, siap bela NKRI?”³ slogan ini menjadi hastag di berbagai media sosial dengan selalu mengaitkan Ahok sebagai “sang penista agama” dari etnis Cina yang telah mengganggu kerukunan dan kedaulatan Umat Islam yang ada di NKRI. Bahkan kaum radikal telah menyatakan secara terang-terangan bahwa Ahok adalah pemecah belah suku dan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam ancaman dan ekspansi Negara Cina.⁴

Apabila memperhatikan ragam polemik dan wacana yang bergulir ini akhirnya melahirkan sebuah hipotesis bahwa hastag jihad penista agama jihad NKRI menjadi trend dakwah tersendiri bagi kaum radikal dalam beberapa media online yang selalu viral pada masa terakhir di negeri ini. Seluruh propaganda, isu dan

²Nafi Muthohirin, “Mewaspadaai Radikalisme Islam di Media Sosial,” dalam <http://geotimes.co.id/mewaspadaai-radikalisme-islam-di-media-sosial/>

³ Seruan jihad bela NKRI pertama kali dimundangkan oleh Habib Rizieq sebagai Imam Besar Front Pembela Islam yang hadir disela kerumunan massa memberikan orasinya dihadapan massa Forum Umat Islam (FUI) yang menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI. Berita seputar FPI dan Kaum Radikal dengan slogan Jihad NKRI ini dapat dibaca dalam <http://nasional.kini.co.id/2017/02/21/20880/habib-rizieq-ajak-massa-jihad-bela-negara-bela-islam-dan-nkri>

⁴Pernyataan kaum radikal ini dapat dilihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=lAlkdqIpLi0>

gerakan kaum radikal telah menjadikan pidato “sang penista agama,” sebagai awal perlawanan (jihad) mereka dapat memunculkan banyak respon dan analisis yang sangat beragam. Apakah untuk kepentingan pilkada DKI Jakarta di satu sisi, atau untuk kepentingan Khilafah dan NKRI bersyariah di sisi lain. Berdasarkan kenyataan inilah, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Untuk membingkai penelitian ini sebagai produk ilmiah maka ada dua fokus yang penulis tawarkan; Mengapa terjadi trend dakwah kaum radikal dalam viral media online dengan menyeru jihad terhadap penista agama sebagai bagian dari jihad NKRI? Bagaimana implikasi dari trend dakwah kaum radikal dalam viral media online dengan menyeru jihad terhadap penista agama sebagai bagian dari jihad NKRI? Dua fokus permasalahan tersebut akan digali menggunakan metode penelitian kualitatif serta teori Antonio Gramsci akan digunakan sebagai kerangka baca terhadap fenomena tersebut. Selain itu, penulis juga akan membatasi fenomena jihad melawan penista agama di era Pilkada Jakarta Tahun 2017 yang lalu. Sebab, persoalan penistaan agama dan perilaku anarkhis kelompok radikal terhadap kelompok tertentu acapkali terlihat tidak hanya pada momentum Pemilihan Kepala Daerah semata.

Radikalisme Islam dalam Perbincangan Media: Sebuah Kajian Teoritis

Adalah dictum *After 9/11 2001 tragedy*, yang menjadi awal mula Islam, radicalism, and terorisme kembali diperbincangkan; apakah itu diskursus akademik, media masa dan elektronik, atau terjemahan etnografis yang diperbincangkan oleh masyarakat di lingkungan mereka masing-masing. J. Esposito mengatakan bahwa 9/11 2001 tragedy ini sebagai keterkejutan global dan memiliki dampak persepsional yang buruk terhadap Islam sendiri. Lebih-lebih, seruan perlawanan terhadap Islam ini dilakukan oleh seorang Presiden negara Adidaya seperti Amerika. J. Esposito mengungkapkan:

“For many, understanding Islam and Muslims can be confusing. Muslim leaders speak of Islam as a religion of peace and justice; Osama bin Laden and other Muslim terrorists slaughter non-Muslims and Muslims globally. President George W. Bush referred to Islam as a religion of peace; the evangelist Franklin Graham called Islam an evil religion; Samuel Huntington, prominent Harvard professor and author of *The Clash of Civilizations*, wrote,

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

‘Islam has bloody borders . . . and innards.’” But, as President Barrack Obama has pointed out, “Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial equality. . . . Partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn’t.”⁵

Ambiguitas pemahaman terhadap Islam yang beragam ini, akhirnya menampilkan Islam dalam pelbagai logos baru. Islam radikal, Islam fundamental, islam liberal, islam moderat, dan islam inklusif. Semua logos ini pun berdampak pada pilihan sikap umat Islam di pilahan dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Hari ini, ketika membicarakan Islam-Indonesia, maka tidak bisa selesai pada ruang moderatisme dua kekuatan besar organisasi Islam (baca; Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah). Di Indonesia sudah memiliki banyak varian keislaman yang direduksi daripada cara berfikir, bersikap, bertindak, dan mereka berasosiasi satu sama lain.

Varian-varian diskursus terkait sikap keislaman di atas pun tidak bisa dilepaskan dari konsesi global tersebut, terlebih tragedy di era reformasi (pembakaran terhadap rumah ibadah agama Kristen di beberapa daerah) dan tragedy terror bom Bali pada tahun 2002. Di kala itu, kontestasi Islamisme (baca; faham dan sikap keislaman, bukan ideology keislaman) kembali di perbincangkan di ruang publik. Ada banyak aktor intelektual akan kembalinya diskursus keislaman di era tersebut. Sebut saja mereka yang mewakili golongan moderat seperti Abdurrahman Wahid, Nur Chalis Madjid, dan cendekiawan muslim Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah. Dari golongan liberal, ada sosok Ulil Abshar Abdallah, Lutfi A., Muqsith Ghazali, serta mereka yang terkumpul di komunitas utan kayu Jakarta. Di pihak berbeda, ada Ismail Yusanto, Hatono Ahmad Jaiz, serta Addian Husaeni, kelompok-kelompok intelektual yang secara corak pemikiran lebih konservatif. Di sisi gerakan, nama seperti Abdullah Sungkar, Abu Bakar Baasyir, dan Imam Samudera, terepresentasi dari kelompok gerakan Jemaah Islamiyah yang di era Soeharto dialenisiasi akibat gerakan makar untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.

Oleh karena panjangnya perdebatan Islamisme dan sikap-sikap nasionalisme di Indonesia yang kesemuanya sudah direkam oleh para akademisi untuk membaca

⁵ J. Esposito, *The Future Of Islam*, (New York : Oxford University Press, 2010), 01

fenomena kekinian. Maka penulis akan membatasi kajian ini pada dua hal penting; *pertama*, re-framing terhadap kontestasi Radikalisme-Islam dan religio-nasionalisme di media online yang penulis dapatkan beberapa tahun terakhir, penulis menyebutnya, di media dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Tentu dengan melakukan spesifikasi representasi dua kelompok yang melakukan perdebatan terkait bagaimana semestinya menghadirkan Islam di Indonesia. *Kedua*, pergeseran para kelompok radikal dalam mengkampanyekan ide radikalnya melalui website organisasi kelompok radikal, media sosial, dan beberapa artikel yang disubmit ke koran bernuansa Islam; seperti republik.

Menurut penulis, di awal reformasi, akses informasi terhadap pemberitaan dan gagasan radikalsme tidak semudah saat ini. Transmisi informasi terkait radikalisme, kecenderungannya, hanya bisa diakses melalui pemberitaan cetak, sangat jarang berbasis *online networking*. Oleh karena itu, penulis akan berupaya melakukan periodeisasi diskursus radikalisme Islam dalam pembacaan para tokoh, liputan media, dan model-model perubahannya. Periode pertama, di era 2001-2005, dimana kontestasi ide keislaman masih berada di ruang sempit di bilik informasi koran. Periode kedua, 2005-2010 dimana akses informasi berbasis internet sudah mulai menghantui Indonesia. Akses internet bahkan bisa diakses oleh masyarakat desa, walaupun masih berbasis pada warung-warung penyedia internet. Di tahun yang sama, media sosial juga sudah mulai diminati oleh masyarakat sebagai media alternative mengetahuin informasi yang berkembang. Terakhir, di kurun waktu 2010 hingga sekarang, dimana akses informasi sudah berada dalam genggamannya masyarakat berbasis handpone pintar, ditambah keterlibatan masyarakat di medsos menjadi lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Hal ini ditambah pula dengan keberadaan televisi berita yang sudah menjadi sumber informasi dominan di masyarakat. Kalau penulis bisa meminjam terminology mereka yang berada di media center para aktor politik; hari ini adalah era generasi Z, generasi yang paham dan ingin selalu terlibat pada setiap aktifitas kehidupan maya (digital).

Pada periode awal ini, para kelompok radikal dan sekaligus kelompok-kelompok moderat di Indonesia melakukan kontestasi melalui media cetak; apakah itu yang dimiliki oleh organisasi keagamaan tersebut, ataupun media nasional yang menyediakan kolom opini dimana masyarakat luar bisa berkontribusi memberikan sumbangsih pemikirannya. Penelitian Syamsul Rizal mengidentifikasi beberapa majalah/media cetak yang memiliki afiliasi terhadap kelompok radikal. Misalnya;

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

Sabili, Ummi, Annida, Tarbawi, Saksi, ⁶ Arie Styaningrum Pamungkas pun melakukan riset serupa terhadap beberapa media-media radikal yang ada di Indonesia yang disebar oleh para kelompok radikal. Perbedaan dengan Rizal, Pamungkas lebih spesifik membicarakan terkait dampak “media dakwah Ummi” dalam proses konstruksi pemahaman Islamisme dan radikalisme di Indonesia.⁷ Dalam kontestasi koran nasional yang memiliki concern lebih terhadap pola dan kehidupan keislaman di Indonesia seperti republika. Diskursus terkait radikalisme bisa jadi lebih terbuka dibandingkan dengan majalah-majalah yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh mereka. Berikut ini adalah beberapa kontestasi yang terjadi pasca radikalisme mencuat ke ruang terbuka di Indonesia, dalam periode tersebut di koran republika.

Dari pembacaan penulis, ada dua gagasan penting terkait radikalisme Islam di Indonesia; *pertama* kelompok yang meminta pemerintah (sebagai regulator) untuk melawan gerakan tersebut karena akan menjadi ancaman serius terhadap kondisi pluralitas di Indonesia, serta gagasan diperlukannya reaktualisasi nilai-nilai yang tidak memiliki motif pemaksaan terhadap ideology yang dipahami. *Kedua, counter-discourse* yang meminta pemerintah untuk tidak menyandingkan sikap teroris dan radikal dengan Islam. Dalam konteks ini, hampir semua media dakwah Islamis memiliki kecenderungan yang sama. Kelompok pertama misalnya karya; Rumadi,⁸ Riza Sahbudi⁹, Umarudin Masdar,¹⁰ dan Dawam Rahardjo.¹¹ Sedangkan dari kelompok kedua ada tulisan Addian Husaeni dan Isma’il Yusanto yang membela Islamisme dari bingkai universalisme absolute. Artinya, islam tidak bisa diidentikkan dengan gerakan radikal dan eksplesit sebagaimana yang disiarkan di dalam konteks terorisme di Indonesia.¹²

⁶ Syamsul Rizal, “Media and Islamism in Post New Order Indonesia; The Case of sabili, *Studia Islamika* Vol 12 No 3, 2005, 431

⁷Arie Setyaningrum Pamungkas, “The Dakwah Media in Post Soeharto Indonesia; From Politics Identity to popular culture; The Case of Ummi, Phd Thesis Universitas Berlin 2015

⁸ Rumadi, “Demokrasi dan Radikalisme Agama” dalam *Surat Kabar Republika Jakarta*, Edisi Kamis, 2 Juni 2002.

⁹Riza Sihbudi Islam, “Radikalisme dan Demokrasi,” dalam *Surat Kabar Republika Jakarta*, Edisi Kamis, 23 September 2004.

¹⁰ Umaruddin Masdar, “Globalisasi dan Radikalisasi Massa” dalam *Harian Pagi Republika Jakarta*, Edisi Jumat, 04 Juli 2003.

¹¹ M. Dawam Rahardjo, “Fatwa MUI Cermin Radikalisasi Syariat Islam,” dalam *Harian Pagi Republika*, Edisi Jumat, 20 Desember 2005.

¹² Adian Husaini, “Simpang Siur Radikalisme,” dalam *Harian Pagi Republika* Edisi Jumat, 01 Desember 2005.

Kontestasi sebagaimana yang penulis ungkapkan di atas, hanya bisa diakses oleh beberapa kelompok masyarakat saja. Penyebaran majalah dan koran yang dibuat oleh kelompok radikal tentu sangatlah minim, berbasis komunitas, dan mereka yang tertarik terhadap isu-isu keislaman di Indonesia. *Framing* islamisme dan bagaimana kontestasi diskursus di koran, media elektronik, dan beberapa majalah lainnya tidaklah sebanyak di majalah hidayatullah, sabili, republika, dan lain-lainnya. Hampir semua koran nasional, sangat fokus untuk memberitakan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan olahraga, yang secara segmentasi pangsa pasar lebih banyak disukai dibandingkan mengangkat ide-ide dan kontestasi keislaman yang tidak kunjung usai diperdebatkan di Indonesia. Atau, bisa jadi, dalam pembacaan penulis terhadap koran dan televisi nasional, para redaktur koran nasional tersebut lebih sadar akan pentingnya gagasan multikulturalisme, pluralisme, dan toleransi, dibandingkan membuat *framing* yang menunjukkan pentingnya kehidupan berbasis agama Islam di Indonesia.

Pada periode kedua, periode yang sudah mulai berganti dari tradisi cetak ke berbasis virtual dan online. Hal ini tampaknya membuat pemerintah dan elemen masyarakat lain yang resah terhadap keberadaan kelompok radikal mulai berfikir untuk mencari cara mengantisipasinya. Para peneliti pun, dalam pengamatan penulis, sudah beralih dari paradigma besar ke tradisi yang lebih post-modernis. Dimana satu postulat, dibingkai dalam kondisi dan realitas tertentu. Para peneliti tidak bisa melakukan generalisasi apa saja situs dan website yang dibuat oleh kelompok radikal tersebut teridentifikasi secara otomatis memiliki afiliasi terhadap kelompok tertentu. Bahkan, sebagaimana penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mulai dari awal tahun 2010 sudah ada 814.594 situs berkonten seruan radikalisme yang diblockir oleh pemerintah.¹³ Pasca Undang-Undang ITE tahun 2008 disahkan, pemerintah pun tidak segan-segan untuk mempublikasikan kepada masyarakat agar lebih mewas diri dalam membaca situs-situs yang bernuansa radikal di Indonesia.¹⁴ Sikap-sikap tegas pemerintah terhadap kelompok radikal di Indonesia ini menunjukkan bahwa keberadaan situs radikal

¹³Lihat Kominfo sudah blokir 814.594 Situs Radikal. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5083/Kominfo+Sudah+Blokir+814.594+Situs+Radikal+0/sorotan_med (diakses pada 21 Nopember 2017)

¹⁴ Lihat Kominfo BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker (diakses pada 21 Nopember 2017)

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

mulai mengganggu stabilitas umat Islam di Indonesia, sekaligus eskalasi perpolitikan nasional.

Pemerintah sendiri memberikan penjelasan bahwa pemblokiran yang dilakukan tersebut karena konten yang bernuansa perlawanan terhadap pemerintah, ajakan untuk melakukan jihad melawan pemerintah, serta melakukan distorsi terhadap ideology Pancasila yang sudah disepakati oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Pada konteks ini, pemerintah tidak melakukan perlawanan terhadap Islam, melainkan kepada kelompok Islam yang mulai mengajak kepada cara makar terhadap negara. Tapi, hal yang unik mungkin, di era demokrasi keberpihakan yang ditunjukkan pemerintah seperti yang sudah diulas sebelumnya, tidak serta merta bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Pertarungan dan peperangan ide kembali muncul menghiasi perdebatan keberpihakan tersebut. Kecenderungan umumnya, karena penulis tidak memungkinkan untuk merangkai satu per- satu pertarungan tersebut; *pertama*, situs-situs kelompok radikal men-*framing* kebijakan pemerintah sebagai bentuk politik arogan dan anti-terhadap demokratisasi. *Kedua*, perlakuan pemerintah dianggap sebagai bagian dari strategi politik untuk menghilangkan Islam. *Ketiga*, perlakuan pemerintah sangat anti-Islam dan mendukung paradigma sekuler. Dan yang paling menarik ‘apapun persoalan dan perlakuan pemerintah’ mereka selalu menawarkan sistem Islam dan negara Islam sebagai solusi terhadap para pembacanya. Padahal, mereka tidak menagaskan apakah sistem Islam yang ditawarkan memberikan ruang kebebasan berekspresi seperti yang demokrasi tanamkan di dalam nilai-nilai pemerintahannya.

Terakhir adalah *era millennial* era dimana pemerintah harus bekerja ekstra untuk bisa membendung radikalisme dan bagaimana mereka melakukan penyebaran ide radikal. Era dimana semua media bisa dibuat, diprivatisasi, kemudian disebarakan tanpa orang bisa memantau secara simultan. Di era ini, keberadaan website, blogspot, dan produk media online lainnya, sudah *linked* terhadap ruang privat; seperti BBM, Twitter, WhatsApp, telegram, dan Facebook. Di ruang privat ini, sebagai aturan main yang dibuat penyediannya sangat dijaga. Tidak ada yang bisa mengatur ruang ini, kecuali mereka yang membuat. Baru-baru ini, pemerintah meminta pemilik media sosial Telegram, untuk memberikan pemerintah akses masuk agar bisa mengamati kelompok radikal pada channel berbagi mereka.¹⁵Suka tidak suka, memang telegram

¹⁵ <https://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737475/telegram-diblokir-jokowi-kita-sudah-lama-amati-dan-ini-demi-keamanan-negara>

menyediakan beberapa fitur yang diberi waktu dan bisa menghilang tanpa sepengetahuan pemerintah atau orang luar (secret chat). Menurut pemerintah, channel telegram juga menyediakan konten-konten yang bernuansa radikalisme, terorisme, dan ajakan untuk merakit bom.¹⁶ Pada ruang-ruang yang terprivatisasi seperti ini, maka membingkai ulang apa sebenarnya yang disebarkan oleh kelompok radikal sudah tidak lagi mudah. Hal yang pasti adalah mereka menyuarakan diri untuk *jihad* melawan pemerintah, jihad melawan antagonism barat dan amerika, serta konten-konten ideologis lainnya, sebagaimana sudah dipaparkan dalam karakter umum gerakan radikal di Indonesia.

PEMBAHASAN

Terlepas dari dimensi strategi politik, perdebatan di media sosial, hingga media *mainstream*, antara kelompok Islam untuk melawan kekuatan politik Ahok. Ada satu topik yang sejatinya akan lebih banyak dikaji dalam penelitian ini, yakni seruan berjihad untuk melawan penista agama dan jihad untuk NKRI, sebagaimana yang diajukan dalam proposal penulis. Jihad melawan penista Agama, oleh karena momentum pidato Rizieq Shihab dikala demo 212 Jilid II (21 Februari 2017) di depan kantor DPR-RI. Bagi penulis, pidato tersebut sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan Islam radikal, terlebih bagi Front Pembela Islam.¹⁷ Namun, hal yang menjadi unik adalah bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan membela NKRI dalam bingkai kelompok radikal ini. Apakah mereka akan menghadirkan Islam sebagai sistem politik, atau sekedar meminta agar norma-norma substantif keislaman menjadi basis dalam proses dan landasan penentuan kebijakan yang ada di Indonesia.¹⁸

Fakta lain terkait kelompok radikal dan NKRI, seperti FPI, FUI, dan kelompok lain yang masih menganggap bahwa NKRI tidak usah dirubah ialah tersedia di laman resmi front pembela Islam. (<http://www.mozaikharokahfpi.com/search/label/Politik>) dan lama resmi [habibrizieq.com](http://www.habibrizieq.com) (walau dalam proses penelitian ini, situs tersebut sudah terblokir/dihack, karena penulis tidak bisa mengaksesnya). Dilaman-laman tersebut

¹⁶ <http://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir-telegram>

¹⁷ <http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2013/02/26/23405/wawasan-kebangsaan-habibrizieq-soal-nkri-dan-gerakan-separatisme/#sthash.8wNOayNJ.7cyUCJr4.dpbs>

¹⁸ <http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2014/06/06/30786/habibrizieq-perda-syariat-sejalan-dengan-konstitusi-nkri-ideologi-pdip-anti-islam/>

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

dengan tegas bahwa mereka ingin membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), apakah itu dari liberalism,¹⁹ komunisme,²⁰ dan imprealisme asing.²¹ Di pihak yang lain memang, aktivitas-aktivitas kelompok ini tidak sesuai dengan pola etis yang ada di dalam bingkai NKRI. Mereka cenderung menggunakan cara-cara anarkhis untuk menegakkan keyakinan mereka. Mereka pun sangat concern terkait isu penistaan dan ponadaan agama khususnya di dalam Islam. Lebih dari itu, mereka juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aktivis kampus yang cenderung memiliki pemikiran Barat, dan lain sebagainya.

Jika melihat hal tersebut, maka tidak salah kemudian apabila pemerintah dan beberapa kepala daerah menghimbau agar FPI tetap mengusahakan utuhnya NKRI. Misalnya, dalam acara ulang tahun FPI yang ke 19. Aneis Baswedan memberikan ucapan selamat dan mengharap FPI bisa menjaga keutuhan NKRI dan Kebhinnekaan yang ada di Indonesia.²² Liputan hidatullah.com pun memberi judul ‘teguhkan komitmen menjaga NKRI, FPI Gelar Milad ke 19 dan Peringatan HUT RI.’²³ Atau liputan merdeka.com pun sama, tajuk yang digunakan adalah FPI akan menjaga NKRI dari kelompok pemecah belah.²⁴ Pun demikian halnya di laman resmi FPI, mereka membuat judul yang lebih menarik perhatian, mereka menyebut bahwa FPI merayakan milad sekaligus berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI.²⁵ Dan masih banyak yang pemberitaan lainnya yang menyebut pola serupa terkait hubungan FPI dan NKRI.

Beda di laman resmi, atau di lama kelompok Islamis radikal lainnya, media-media nasional acapkali memang men-*frame* FPI dan beberapa kelompok tegaknya syariah Islam tanpa merubah NKRI mejadi negara Islam, sebagai kelompok yang anti-NKRI. Hal ini disebabkan, apa yang diungkapkan dan dilaksanakan dalam bentuk tindakan tidak berlaku sama. Contoh dalam beberapa kasus FPI melakukan kegiatan-kegiatan yang ‘melanggar’ ketaatan sebagai warga negara terhadap

¹⁹ <http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/09/fpi-dengan-dukungan-penuh-kopassus-dan.html>

²⁰ <http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/08/pernyataan-sikap-dpp-fpi-terhadap.html>

²¹ <http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/07/ada-israel-di-tolikara.html>

²² <https://www.antaraneews.com/berita/647554/anies-minta-fpi-jaga-nkri-dan-kebhinekaan>

²³ <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/19/121780/teguhkan-komitmen-jaga-nkri-fpi-gelar-milad-ke-19-dan-peringatan-hut-ri.html>

²⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/fpi-kami-akan-jadi-garda-terdepan-jaga-nkri-dari-kelompok-pemecah-belah-bangsa.html>

²⁵ <http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/09/fpi-dengan-dukungan-penuh-kopassus-dan.html>

konstitusi yang ada; menghina Pancasila,²⁶ mencoret bendera merah putih,²⁷ menolak pembangunan rumah ibadah bagi agama lain,²⁸ atau penolakan terhadap kelompok yang tidak sepaham dengan mereka melalui cara-cara yang anarkhis. Maka dari itu, potret dan slogan yang dikampanyekan serta disahkan oleh para aktor politik terhadap keberadaan FPI ingin menjaga NKRI membutuhkan penafsiran ulang. Hal ini tampak seperti *lips service* para tokoh FPI agar tidak menjadi lawan utama pemerintah.

Pola yang sama sejatinya juga dilakukan oleh para kelompok radikal lainnya, jika melihat apa yang tampil di dalam liputan dunia maya. Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan kaki tangan gerakan transnasional, Hizbut Tahrir Indonesia, dan beberapa kelompok lainnya yang memainkan panggung politik sebagai model gerakan mereka, acapkali menyebut bahwa NKRI sudah final. NKRI sudah menjadi hasil ijtihad bersama tidak bisa diganggu gugat. Berikut ini adalah beberapa pemberitaan terkait dengan PKS yang mendukung NKRI; republika.co.id “PKS Sulut Keutuhan NKRI Harga Mati”²⁹, pada laman resmi partai, “Legislator PKS; NKRI Harga Mati”³⁰ dan PKS tunjukkan rasa nasionalisme dan NKRI harga mati”³¹. Demikian halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang hari ini sedang diambang pembubaran oleh pemerintah. Dalam berbagai kesempatan ketua HTI selalu menegaskan bahwa kegiatan HTI tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI,³² HTI turut andil dalam meneguhkan NKRI dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat,³³ dan HTI hanya memberikan gagasan untuk didiskusikan untuk mencari format terbaik buat NKRI.³⁴

²⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581324d499b3f/dinilai-menghina-pancasila--ketua-fpi-dilaporkan-ke-bareskrim>

²⁷ <http://news.liputan6.com/read/2833684/polisi-pembawa-bendera-dicoret-tersangka-dan-simpatisan-fpi>

²⁸ <http://www.beritasatu.com/megapolitan/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html>

²⁹ <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/trend/17/05/03/en/islam-in-archipelago/13/11/21/nasional/daerah/13/10/30/mvh5rm-pks-sulut-keutuhan-nkri-harga-mati>

³⁰ <http://pks.id/content/legislator-pks-nkri-harga-mati>

³¹ <http://www.pkskabsmg.id/2017/10/09/kader-pks-tunjukkan-sikap-nasionalisme-yang-tinggi-nkri-harga-mati/>

³² <https://nasional.tempo.co/read/873786/disebut-usung-konsep-khilafah-di-indonesia-ini-pengakuan-hti>

³³ <https://nasional.sindonews.com/read/1203734/13/ismail-yusanto-kegiatan-hti-tak-bertentangan-dengan-pancasila-1494310247>

³⁴ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/09/hti-bantah-tudingan-tidak-punya-kontribusi-bagi-negara>

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

Dari fakta ini terlihat jelas, bahwa seruan-seruan anti-Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika hanya dilakukan pada ruang-ruang tertutup saja. Mereka tidak berani mendeklarasikan diri sebagai kelompok yang ingin mendirikan sistem berbeda dengan empat pilar kebangsaan yang ada di Indonesia. Sesekali mereka tidak sepakat pada Pancasila, UUD 45, dan keragaman yang ada di Indonesia, namun mereka masih ingin berlindung di balik terma Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau sebaliknya, dia menyangsikan keberadaan sistem negara kesatuan (republic), tapi tetap mengakui keragaman yang ada di Indonesia sebagai bentuk otentik dan takdir dari yang maha kuasa. Lebih-lebih, harus diakui, diksi dan logos yang mereka gunakan di dalam kontestasi politik memang lebih sering hipokrit, sekedar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia yang plural tersebut. Mereka tidak segan-segan mengaku paling nasionalis dan pendukung NKRI apabila sudah dalam kondisi kontestasi politik. Atau, ini sekedar anekdot di media sosial, kelompok-kelompok radikal ini adalah kelompok nasionalis dadakan. Mendadak nasionalis setelah detersangkakan, mendadak nasionalis setelah akan dibubabarkan, mendadak nasionalis setelah mulai ditinggalkan pengikutnya.

Di atas sudah dijelaskan bagaimana para kelompok radikal membungkus gerakan politik mereka dalam ruang media online. Hal yang paling sederhana untuk diterjemahkan adalah mereka menunjukkan symbol-simbol islam sebagai bagian dari wujud perjuangan mereka. Ditambah lagi mereka tidak menampilkan upaya-upaya makar sebagaimana yang sering ditunjukan kepada mereka. Mereka, dalam pandangan sepihak penulis, memainkan peran Islamisme pada bingkai NKRI. Jadi, dengan cara seperti itu, keberadaan mereka tidak bisa ditolak oleh semua golongan yang ada di Indonesia, terkhusus umat Islam. Bisa jadi, hal tersebut akan sedikit berbeda apabila corak-corak keislaman yang mereka gunakan, sama persis dengan ideology terselubung yang mereka indoktrinasikan kepada seluruh anggota organisasi tersebut. Misalnya mereka menggunakan nama berbeda dibandingkan asal-muasal kelompok mereka. Perkumpulan penyeru Jihad melawan penista agama ini adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (GNPF MUI). Mereka terlebur dari satu institusi dan bersanding dengan pemilik otoritas keagamaan yang ada di Indonesia.

Selain menyembunyikan beberapa karakteristik radikal yang ada di dalam kelompok tersebut, mereka juga memainkan emosi umat Islam melalui diksi yang sangat provokatif. Misalnya saja, jihad, kafir, penista agama, dan Cina. Kata jihad,

dalam tradisi Islam adalah sikap kesungguhan untuk melakukan pembelaan kepada agama. Kata jihad juga berimplikasi pada pengorbanan yang tidak ada batasan bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kata jihad juga bermakna peperangan kepada mereka yang melakukan penindasan terhadap masyarakat. Dan, apa yang ditampilkan dalam Pilkada Jakarta, Ahok acapkali diilustrasikan sebagai sosok yang sangat anti-Islam,³⁵ Ahok melakukan penafsiran terhadap kitab suci orang lain, dan Ahok melakukan pengusuran terhadap orang-orang Islam yang miskin di Jakarta dan lebih bersepakat dengan orang Cina yang memiliki modal lebih untuk membangun gedung-gedung megah di Jakarta. Dan masih banyak isu-isu lain yang dibingkai oleh kelompok radikal ini. Maka dari itu, konklusi yang paling sederhana kenapa bisa menjadi viral di media sosial, karena mereka memainkan emosi dan rasa kepemilikan umat Islam pada agama yang diyakini kebenarannya.

Selain itu, mereka juga mengategorikan Ahok sebagai orang kafir. Kata kafir, dalam kamus orang Islam memang dilarang menjadi seorang pemimpin. Kata kafir adalah ‘musuh’ Nabi Muhammad dikala memimpin Islam. Kata Kafir merupakan bahasa yang ditujukan kepada siapapun yang memusuhi Islam. Serta, harus juga disadari bahwa, larangan seorang Kafir sebagai seorang pemimpin adalah pasti (qath’i). Adapun perdebatan para cendekiawan muslim, di ruang yang jauh dari kerumunan masyarakat terkait interpretasi Kafir, tampaknya tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas memiliki pengalaman pendidikan keagamaan di lingkungan yang sangat rural. Maka dari itu, dikala kata Kafir diidentikkan kepada Ahok, tidak ada alasan lain untuk melihat sisi benar Ahok; Ahok adalah non-muslim. Lebih-lebih disaat Ahok harus menghadapi vonis sebagai seorang yang menistakan agama Islam oleh Sikap Keagamaan Majelis Ulama’ Indonesia. Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain pun berkontribusi untuk mendefinisikan Ahok sebagai sosok yang layak untuk dilawan dan ‘halal darahnya’ untuk dibunuh, sebagaimanaungkapannya dalam dialog di Indonesia Lawyer Club.

Di pihak yang lain, Ahok adalah orang non-Pribumi. Ahok berasal dari etnis minoritas, tapi memiliki sejarah mendominasi nilai keekonomian yang ada di Indonesia. Maka jelas, emosi masyarakat terhadap sosok Ahok bisa dibingkai dari pelbagai aspek tersebut. Ahok bisa ditenggelamkan melalui isu berbasis agama, karena melakukan penistaan agama, dan hal ini masih menjadi living conflict yang

³⁵ <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/heboh-ahok-melarang-sembelih-kurban.htm>

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

tidak punya ujung pangkal di Indonesia. Ahok juga merupakan sosok keturunan etnis Tionghoa yang memiliki sejarah kelam di Indonesia, dan Ahok juga memiliki modal komunikasi politik konfliktual dan anti-kompromi terhadap aktor-aktor politik.

Terakhir, mungkin ini sangat subjektif, tapi bisa dibuktikan kebenarannya. Secara faktor Ahok, faktor menguatnya sikap konservatisme dan Islamisme di dunia, serta dukungan moral yang diberikan oleh MUI, ada satu lagi yakni Tim Buzzer dan Media Center Partai Politik semua pihak yang berkontestasi di Pilkada Jakarta. Bagi para pengamat politik, media sosial, dan kalangan muda, cyber war yang hari ini ada sudah pasti didukung oleh Sumber Daya Manusia terlatih. Para Tim Media Center masing-masing calon bisa memainkan bermacam akun media sosial dalam satu gengaman mereka. Mereka bisa membuat trending topic menggunakan robotic akun dan jejaring yang mereka miliki. Dalam pengamatan penulis, semua tim media sosial pada Pilkada Jakarta bermain seperti sedang berperang dalam arti yang sesungguhnya. Penulis bisa melihat bagaimana hastag ketiga calon ini bergantian saat debat berlangsung di dalam proses Pilkada. Penulis kira, semua elemen tersebut memberikan sumbangsing yang sangat kuat terhadap kenapa isu jihad melawan isu agama bisa hit di media sosial.

Bagi penulis sendiri, ada dua dampak dakwah radikalisme Islam yang terjadi di Pilkada Jakarta: Pertama, dampak terhadap internal umat Islam sendiri. Kedua, dampak eksternal terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian pertama, dakwah kelompok radikal melalui media sosial ini berimplikasi terhadap demistifikasi terhadap ajaran Islam dan tokoh yang mendukung Ahok di era pemilukada tersebut. Misalnya, bagaimana para tokoh-tokoh pluralis seperti Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Musthofa Bisri, Nadirsyah Husen, dan Ahmad Sahal diidentikkan dengan para kelompok yang tidak memahami agama Islam secara benar. Padahal, semua orang tahu, para pemikir Islam tersebut memiliki karya dan kontribusi yang sangat banyak dalam hal sikap keislaman moderat di Indonesia. Kelompok radikal berhasil membuat garis demarkasi, mana yang benar-benar Islam, dan mana kelompok yang Islamnya dikalahkan oleh sikap-sikap toleran dan kebarat-baratan.

Selain terhadap tokoh Islam moderat, garis demarkasi ini akhirnya juga menghentak anak muda dalam kelompok moderat ini. Oleh karena mereka masih muda, maka sikap yang diambil mereka berbeda dengan para sesepuhnya yang lebih

bijaksana dalam bertindak. Pertarungan kelompok moderat dan radikal menjadi sangat tampak; seperti penolakan Banser dan Ansor terhadap Habib Riziq di Bangil Pasuruan, Penolakan terhadap Felix Shauw dan Basallamah di Surabaya, dan masih banyak tindakan lain yang merupakan reaksi daripada demistifikasi kelompok radikal kepada para kyai yang mejadi panutan di kalangan Nahdliyin khususnya. Tak sekedar itu sebenarnya, para pemuda Nahdlatul Ulama' pun sangat kreatif dalam melakukan cyber-war. Mereka menduplikasi situs-situs yang berkonten radikalisme Islam menjadi lebih toleran. Mereka membuat blog, akun twiter, dan fanspage facebook untuk melakukan counter-strategy terhadap kelompok radikal yang sudah lebih awal melakukan hal tersebut.

Adapun dampak eksternal, tentu, disharmoni dalam kerukunan umat beragama. Perlakuan deskriminatif terhadap Ahok, akhirnya berdampak pula pada penolakan-penolakan tokoh Islam-Radikal di daerah-daerah yang mayoritas beragama Kristen atau agama lainnya. Ada banyak fakta penolakan terhadap kelompok radikal ini di beberapa daerah, di Bali misalnya, atau penolakan tegas masyarakat Dayak terhadap Tengku Zulkarnaen³⁶ di Sintang. dan beberapa daerah lainnya. Bahkan, dalam analisa Idrus Al Hamid, efek Jakarta juga menghampiri Jayapura, Manado, dan Ambon Maluku. Di daerah yang mayoritas tidak beragama Islam ini, mulai dipikirkan bagaimana mereka juga ingin membuat aturan agar calon pemimpin daerah harus memiliki agama yang sama dengan mayoritas agama masyarakat sekitar mereka. Tentu, hal ini menjadi sangat kontra produktif terhadap pola-pola kerukunan umat beragama yang sudah sangat lama dibangun di Indonesia. Kontra produktif terhadap symbol toleran dan moderat yang dikembangkan oleh pemerintah.

Bagi penulis, terdapat empat konsep penting dalam dalam membicarakan pemikiran Antonio Gramsci. Pertama, culture (budaya). Kedua, Hegemony. Ketiga, intelektualisme. Keempat, krisis. Pada posisi budaya, Gramsci membicarakan terkait bagaimana the ruling group memainkan peranannya, atau bisa jadi kehilangan power yang dimiliki. Pada posisi cultural ini pula, istilah war of position dan war of maneuver didefinisikan oleh Gramsci. Dalam konteks ini, menurut Gramsci, sebuah kelompok besar yang memiliki peranan kuat dalam membentuk dan membangun sistem nilai budaya sebuah negara, bisa dikalahkan oleh sikap dan manuver yang

³⁶ <https://nasional.tempo.co/read/835346/wasekjen-mui-tengku-zulkarnain-ditolak-warga-dayak-sintang>

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

dilakukan oleh kelompok-kelompok militant. Dia mencontohkan bagaimana dogma hegemonic yang dilakukan oleh para perancang kekuatan kapitalisme Global, bisa dikalahkan oleh para kelompok komunis yang ada di Rusia. Bagi Gramsci, sebuah percaturan dan pencarian posisi strategis menjadi sangat penting untuk membentuk supra-struktur kebudayaan yang ada di negara tertentu.³⁷ Stave Jones memberikan konklusi terhadap pandangan Gramsci sebagaimana kesimpulan berikut:

“..the notion that the economic base determines the operations of an ideological and cultural superstructure. He proposes instead that we see the relationship between base and superstructure as a reflexive and dynamic one. Within this formation, he isolates civil society as having a key intermediary role and proposes that both conservative and transformative projects attempt to occupy consciousness and everyday life through the functioning of a civil society created in their service. To change society involves a protracted period of negotiation carried out in all the institutions of society and culture....since it involves elaborating subaltern and subordinate elements into a broader cultural and political project without dismissing their cultural distinctiveness.”³⁸

Kutipan ini bermakna bahwa sebuah nilai kebudayaan dan ideology sebuah bangsa, akan terus menerus berjalan dinamis, tidak statis. Dia berbeda dengan kelompok pemikir seperti Althusser dan Karl Marx yang menganggap bahwa ruang kebudayaan lebih banyak dipengaruhi oleh piloting ideology dan kapitalisme yang bermain di belakang sebuah ideology bangsa. Bagi Gramsci, sebuah ideology akan terus berdialektika berdasarkan pada kekuatan supra-culture yang bermain di dalam masyarakat. Keyakinan inilah yang penulis lihat dibalik sebuah fenomena dakwah radikal yang mengalahkan diskursus panjang tentang moderatisme, liberalism, pluralisme, dan toleransi di Indonesia. Masyarakat Indonesia kembali pada era dimana konstestasi ideology agama dan keindonesiaan dipertentangkan melalui perangkat yang terselubung. Mereka, kelompok-kelompok radikal, sangat sadar betul tidak bisa menghadirkan isu anti-nasionlisme dihadapan masyarakat Indonesia, namun dia bisa menyelipkan Islamisme-Radikal pada sebuah kontestasi politik yang ada di Indonesia Lebih-lebih di dalam masyarakat demokratis. Hal ini senada dengan

³⁷ Antonio Gramsci, *Selection From The Prison Notebook*, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000.

³⁸ Stave Jones, *Antonio Gramsci*, (Madison Eve, New York: Routledge, 2006), 99.

asumsi teoritik yang dikembangkan oleh Greg Fealy dan Anthony Bubalo yang menyebutkan bahwa demokrasi memiliki peran ganda; memberikan kebebasan untuk bertindak, sekaligus memberikan ruang konservatisme dan fundamentalisme berkembang, sehingga mereka bisa mengekang kembali kondisi masyarakat di Indonesia.

Kedua, hegemoni. Secara teoritik Gramsci mendefinisikan hegemoni, sebagaimana dikutip oleh Steve Jones sebagaimana berikut:

“Instead of seeing the economy as determining culture and politics, Gramsci argues that culture, politics and the economy are organized in a relationship of mutual exchange with one another, a constantly circulating and shifting network of influence. To this process he gives the name hegemony and how hegemony differs fundamentally from domination. Seeing hegemony as a dynamic process militates against the view that students of culture can understand the meaning of a text in isolation. In this sense, asking you to analyse a single participatory programme was mildly disingenuous, since no one representation can capture the nexus of power at any one moment – it is indeed, for Gramsci, precisely not something that one can pin down since it is always ‘in the process of becoming’”.³⁹

Artinya, Gramsci memaknai kata Hegemoni bukan bertitik tumpu pada dominasi dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok atau kelas sosial tertentu. Namun, kata hegemoni bermakna on going process yang dinamis. Yang bisa dilakukan melalui beberapa cara dan penegakan. Hegemoni, menurut Gramsci memiliki banyak faktor dan variable yang bisa dianalisa, tidak selalu didominasi dari aspek politik, ekonomi, dan kebudayaan semata. Dasar epistemologi Gramsci dalam hegemoni ini bisa diasumsikan bersumber dari konsep kesadaran. Suatu pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembiasaan maupun pemaksanaan (doktrinasi) ke dalam atmosfir kesadaran kolektif-massif, sehingga menimbulkan kesadaran yang relatif baru. Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam suatu kelompok, tidak selalu mudah ditebak asalnya, bisa jadi kesadaran dan pengetahuan yang selama ini mengendap dalam masyarakat, merupakan program hegemonik yang ditanamkan subjek kelompok tertentu.

³⁹ *Ibid.* 78.

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

Hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial-politik yang dalam terminologi Gramsci disebut momen, dimana filsafat dan praktik sosial menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dari spirit ini berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual. Hegemoni selalu berhubungan dengan negara sebagai kelas diktator.⁴⁰ Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi sebagaimana menurut Lenin menjadi sebuah konsep yang seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara, menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya tentang hegemoni. Suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, mereka harus tetap “memimpin”.

Konsep hegemoni ini bisa dilacak melalui penjelasan Gramsci tentang supremasi kelas. Menurutnya, supremasi sebuah kelompok mewujud dalam dua cara: dominasi dan kepemimpinan intelektual. Hegemoni menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin. Ini menjadi dalam citra konsensual. Konsensus yang terjadi antara dua kelas ini diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung melalui pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat-perangkat kekuasaan. Dengan kata lain hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Pada hakikatnya, hegemoni merupakan upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.⁴¹

Secara praktis, menurut Gramsci seseorang bisa melakukan hegemoni melalui tiga proses internalisasi sebagaimana berikut; pertama, identitas, yaitu sebuah lokus yang disematkan kepada seseorang, apakah itu sebagai bentuk profesi ataupun sifat psikologis seseorang. Kedua, representasi, artinya, seseorang tersebut harus bisa mewakili kegelisahan dan kesamaan persepektif seseorang yang akan dirasuki alam

⁴⁰ *Ibid.*, 90.

⁴¹ Peter Mayo, *Gramsci and Educational Thought* (Oxford: Wiley Blackwell, 2010), 23.

bawah sadarnya. Ketiga, institusionalisasi, yakni proses pelembagaan terhadap ide-ide dan identitas yang sudah dibaca sebelumnya. Maka dari itu, kalau melihat apa yang terjadi di Jakarta, pertarungan dan pertarungan identitas siapa yang paling Islam dan tidak sepenuh Islam dilakukan oleh kelompok radikal dalam melancarkan dakwahnya. Mereka juga merepresentasikan kelompoknya dari semua elemen, misalnya; ada golongan Islamist Nahdlatul Ulama' seperti yang sering diungkapkan mengikuti KH. Ma'ruf Amin yang notabene adalah Ketua Syuriah NU. Din Syamsudin dan Amin Rais dari Muhammadiyah, serta kelompok-kelompok Islam lainnya yang bisa jadi berhaluan pemikiran moderat, tidak radikal. Bahkan, kelompok-kelompok nasionalis pun tidak luput dalam representasi kelompok mereka; ada sosok Prabowo Subianto, Kivlan Zein, dan beberapa purnawiran TNI yang seakan-akan berada di bawah menguatnya Islamisme di Indonesia. Merekapun mendompleng MUI sebagai institusionalisasi ide dan gagasan mereka.

Selanjutnya adalah intelektualisme. Bagi Gramsci intelektualisme adalah perangkat penting dalam melakukan hegemoni atau memenangkan percaturan ideologis atau kebudayaan. Di dalam buku *Prison notebook*nya, Gramsci mendefinisikan apa yang dia maksud dengan intelektualisme tersebut dalam fungsi sosial;

“distinct social category independent of class is a myth. All men are potentially intellectuals in the sense of having an intellect and using it, but not all are intellectuals by social function. Intellectuals in the functional sense fall into two groups. In the first place there are the “traditional” professional intellectuals, literary, scientific and so on, whose position in the interstices of society has a certain inter-class aura about it but derives ultimately from past and present class relations and conceals an attachment to various historical class formations. Secondly, there are the “organic” intellectuals, the thinking and organizing element of a particular fundamental social class. These organic intellectuals are distinguished less by their profession, which may be any job characteristic of their class, than by their function in directing the ideas and aspirations of the class to which they organically belong.”⁴²

Dalam percaturan Pilkada Jakarta, Eep Syaiful Hidayat, Yunarto Widjaya, dan beberapa tim branding pasangan calon yang memiliki kemampuan membaca

⁴² Antonio Gramsci, *Selection From The Prison Notebook*, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000. 105.

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

kecenderungan pemilih dan sikap keislaman masyarakat di Indonesia bisa dijadikan sebagai kelompok intelektual yang berupaya untuk memainkan isu keagamaan menjadi viral di media masa. Pembacaan jitu seperti itu, tentu, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Bahkan oleh intelektual muslim sendiri. Penulis pun ingat, bagaimana pasca Pilkada Jakarta Syafii Maarif menasar para tim sukses pasangan calon tertentu yang melakukan kolaborasi aktif dengan kelompok radikal yang ada di Jakarta. Di kesempatan yang sama, salah seorang tim sukses menanggapi pernyataan kekhawatiran tersebut dengan menunjukkan langkah-langkah strategis untuk merajut kembali konflik agama yang ada di Jakarta. Dia mencontohkan bagaimana awalnya Jokowi dan Prabowo berkontestasi, namun tak lama berselang mereka berdua kembali akrab sehingga membentuk rekonsiliasi Indonesia lebih cepat dari yang diprediksikan.

Terakhir dari proses pendefinisian teori Gramsci adalah krisis. Bagi Gramsci keberadaan krisis juga faktor penting untuk melakukan hegemoni. Dia mengatakan bahwa:

“In every country the process is different, although the content is the same. And the content is the crisis of the ruling class’s hegemony, which occurs either because the ruling class has failed in some major political undertaking for which it has requested, or forcibly extracted, the consent of the broad masses (war, for example), or because huge masses . . . have passed suddenly from a state of political passivity to a certain activity, and put forward demands which taken together, albeit not organically formulated, add up to a revolution. A ‘crisis of authority’ is spoken of: this is precisely the crisis of hegemony, or general crisis of the State.”⁴³

Dalam hal ini, dalam pandangan penulis, demonstrasi berjilid dan permainan media sosial merupakan sebuah usaha untuk melakukan deligitamasi pada otoritas negara sehingga tercipta krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah sendiri sudah melakukan banyak upaya untuk membentuk sebuah pola gerakan berbeda. Namun, manuver pemerintah dan gerakan politik yang digunakan tidak bisa dapat membendung apa yang terjadi di Jakarta. Jakarta sudah menjadi pusaran kekuatan Islamisme-Radikal, panggung kelompok-kelompok intoleran, dan mendapatkan

⁴³ Ibid, 192

legitimasi power dari majelis Ulama' Indonesia, sebagai representasi umat Islam secara umum.

Pada intinya, dalam pandangan penulis terkait dinamika Pilkada Jakarta, Penggunaan istilah Jihad melawan penista agama, serta branding politis bahwa kelompok radikal untuk tetap menjaga keutuhan NKRI merupakan sebuah wujud hegemonik mereka mengalahkan kekuatan kebudayaan umat Islam yang moderat, toleran, serta plural. Mereka, bersama para aktor intelektual di belakangnya, menyadari untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan agama harus berkolaborasi dengan MUI (lembaga fatwa khususnya), kemudian memainkan media sosial untuk mengajak semua berpartisipasi, melakukan counter discourse baik melalui media online mereka sendiri atau menjadi nara sumber di media nasional. Setelah itu, berkongsi dengan politisi yang berkepentingan untuk melakukan advokasi terhadap ide yang digagasnya. Terakhir, mereka menggunakan slogan-slogan simbolik bernuansa Islam untuk mendekati umat Islam dengan perjuangan yang mereka akan lakukan. Hal ini serupa dengan pola yang dipaparkan oleh Masdar Hilmy terkait bagaimana kelompok-kelompok radikal melakukan perlawanan politis-strategis terhadap program deradikalisasi yang diluncurkan pemerintah. Hanya saja, mereka tidak melakukan cara-cara terror dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

PENUTUP

Pada kesimpulannya, keberadaan dakwah radikal menjadi viral dan centre of attention umat Islam di Indonesia disebabkan beberapa faktor; *pertama*, pertarungan politik yang menghadirkan politik identitas di Indonesia. *Kedua*, adanya pergeseran sikap Islamisme yang ada di Indonesia; dari moderat ke konservatif. *Ketiga*, diksi yang dipilih menggunakan pendekatan simbolisasi Islam ajaran keislaman yang literlek. *Keempat*, dukungan tim sukses dan kelompok intelektual dalam proses penyebaran tersebut. Ada dua dampak yang dihasilkan dari proses dakwah radikal ini; *pertama*, adanya demistifikasi terhadap tokoh agama (khususnya mereka yang berhaluan pemikiran moderat) dan perpecahan umat Islam di grass root (akar rumput). *Kedua*, menguatnya sikap intoleran yang ditunjukkan umat Islam dan sebaliknya umat non-Muslim di beberapa daerah.

Secara teoritik, cara baca terhadap media hari ini tidak bisa serta merta dilihat dari produk jurnanisme yang mainstream saja, melainkan juga melihat relasi

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

mutualistik antara sosial media, aktor politik, dan aktor intelektual yang bermain di balik pemberitaan. Setidaknya, melalui pembacaan yang demikian, akan menghasilkan pemahaman yang holistic; termasuk politik pemilik media. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan sebuah landasan untuk membaca ulang bagaimana kelompok radikal menggunakan isu menyelamatkan NKRI sebagai ruang bersembunyi dari ideology yang ditampilkan. Pemerintah perlu memikirkan ulang bagaimana semestinya politik keagamaan dan identitas dihadirkan di Indonesia. Agar pola-pola serupa tidak ditiru oleh daerah lain yang ada di Indonesia. Pemerintah, walaupun sudah dilakukan, tidak perlu takut untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan seruan radikalisme di Indonesia.

Acknowledgements

Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dibiayai dari dana BOPTN DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: Un.01/KPA/569/2017 tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2017 Kluster Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman tanggal 25 Juli 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Setyaningrum Pamungkas, "The Dakwah Media in Post Soeharto Indonesia; From Politics Identity to popular culture; The Case of Ummi, Phd Thesis Universitas Berlin 2015
- Esposito, J. *The Future Of Islam*. New York : Oxford University Press, 2010.
- Gramsci, Antonio. *Selection From The Prison Notebook*, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000.
- Gramsci, Antonio. *Selection From The Prison Notebook*, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000.
- Husaini, Adian. "Simpang Siur Radikalisme," dalam *Harian Pagi Republika*. Edisi Jumat, 01 Desember 2005.
- Islam, Riza Sihbudi. "Radikalisme dan Demokrasi," dalam *Surat Kabar Republika Jakarta*. Edisi Kamis, 23 September 2004.
- Jones, Stave. *Antonio Gramsci*. Madison Eve, New York: Routledge, 2006.

Masdar, Umaruddin. "Globalisasi dan Radikalisasi Massa" dalam *Harian Pagi Republika Jakarta*. Edisi Jumat, 04 Juli 2003.

Mayo, Peter. *Gramsci and Educational Thought*. Oxford: Wiley Blackwell, 2010.

Rahardjo, M. Dawam. Fatwa MUI Cermin Radikalisasi Syariat Islam, *Harian Pagi REPUBLIKA* Edisi Jumat, 20 Desember 2005.

Rizal, Syamsul. "Media and Islamism in Post New Order Indonesia; The Case of sabili, *Studia Islamika* Vol 12 No 3, 2005.

Rumadi. "Demokrasi dan Radikalisme Agama" dalam *Surat Kabar Republika Jakarta*. Edisi Kamis, 2 Juni 2002.

Sumber Internet

<http://nasional.kini.co.id/2017/02/21/20880/habib-rizieq-ajak-massa-jihad-bela-negara-bela-islam-dan-nkri>

<http://news.liputan6.com/read/2833684/polisi-pembawa-bendera-dicoret-tersangka-dan-simpatian-fpi>

<http://pks.id/content/legislatur-pks-nkri-harga-mati>

<http://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir-telegram>

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581324d499b3f/dinilai-menghina-pancasila--ketua-fpi-dilaporkan-ke-bareskrim>

<http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/07/ada-israel-di-tolikara.html>

<http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/08/ Pernyataan-sikap-dpp-fpi-terhadap.html>

<http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/09/fpi-dengan-dukungan-penuh-kopassus-dan.html>

<http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/09/fpi-dengan-dukungan-penuh-kopassus-dan.html>

<http://www.pkskabsmg.id/2017/10/09/kader-pks-tunjukkan-sikap-nasionalisme-yang-tinggi-nkri-harga-mati/>

JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI

<http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/trend/17/05/03/en/islam-in-archipelago/13/11/21/nasional/daerah/13/10/30/mvh5rm-pks-sulut-keutuhan-nkri-harga-mati>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/09/hti-bantah-tudingan-tidak-punya-kontribusi-bagi-negara>

<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/02/26/23405/wawasan-kebangsaan-habib-rizieq-soal-nkri-dan-gerakan-separatisme/#sthash.8wNOayNJ.7cyUCJr4.dpbs>

<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/06/06/30786/habib-rizieq-perda-syariat-sejalan-dengan-konstitusi-nkri-ideologi-pdip-anti-islam/>

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5083/Kominfo+Sudah+Blokir+814.594+Situs+Radikal+/0/sorotan_med

<https://nasional.sindonews.com/read/1203734/13/ismail-yusanto-kegiatan-hti-tak-bertentangan-dengan-pancasila-1494310247>

<https://nasional.tempo.co/read/835346/wasekjen-mui-tengku-zulkarnain-ditolak-warga-dayak-sintang>

<https://nasional.tempo.co/read/873786/disebut-usung-konsep-khilafah-di-indonesia-ini-pengakuan-hti>

<https://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737475/telegram-diblokir-jokowi-kita-sudah-lama-amati-dan-ini-demi-keamanan-negara>

<https://www.antaraneews.com/berita/647554/anies-minta-fpi-jaga-nkri-dan-kebhinekaan>

<https://www.erasuslim.com/berita/nasional/heboh-ahok-melarang-sembelih-kurban.htm>

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/19/121780/teguhkan-komitmen-jaga-nkri-fpi-gelar-milad-ke-19-dan-peringatan-hut-ri.html>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/fpi-kami-akan-jadi-garda-terdepan-jaga-nkri-dari-kelompok-pemecah-belah-bangsa.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=lAlkdqIpLi0>

Muthohirin, Nafi. “Mewaspadaai Radikalisme Islam di Media Sosial,” dalam <http://geotimes.co.id/mewaspadaai-radikalisme-islam-di-media-sosial/>

Pujiati, Tri. “Dakwah Radikal dan Propaganda Media Sosial,” dalam <http://jalandamai.org/dakwah-radikal-dan-propaganda-media-sosial.html>